

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- A Rusdiana dan Ahmad Ghazin. 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*. Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. 2012. *Antropologi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Diindonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- M Manulang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mariam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Moekijat. 1998. *Analisis Jabatan*. Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Nur Basuki Minarno. 2010. *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbag Mediatama. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang*. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya.

- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R Subekti. 2011. *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermedia. Jakarta.
- Ranupandojo. 2000. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi Dan Operasional*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Siswanto Suanmo. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- . 2010. *Pengantar Hukum Penelitian*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Ghalia. Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoks Konflik Dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Sinar Mulia. Jakarta.
- Yosa. 2010. *Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Depdagri.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Skripsi, Jurnal, Disertasi, Makalah, dan Kamus Hukum

Abdurrahim Odeyani, Marthen Arie, Dan Muhammad Djafar Saidi. 2011.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap

- Implementasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Helmahere Tengah.*
Jurnal. Makassar.
- Abidin, Zainal. *Modul Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.* Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bea Dan Cukai. Jakarta.
- Ester Duma Asi Tinambunan. 2014. *Evaluasi Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Serdang Begadai.* Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Ilham Nur Putra. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Wilayah Kota Makassar.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Hukum Pengawasan Tentang Pengawasan.* Perkuliahan. Fakultas Hukum UNHAS. Makassar.
- Muh. Hasrul. 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah.* Jurnal Amanna Gappa. Vol. 25 No. 2 September. Fakultas Hukum UNHAS. Makassar.
- Nining Haslinda Zainal. 2008. *Analisi Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar.* Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia.* Depertemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Rukiah Rahman Ali, Herman Karamoy, Jessy D.L Warongan. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Googwill' 8 (2). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Wahdah Zainal Imam. 2020. *Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industry Penerbangan*. Jurnal Amanna Gappa. Vol. 28 No. 1 Maret. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Website

bpkad.makassar.go.id/bpkadmakassar/page/2

<https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/16-optimalisasi-ase-negara-daerah> di akses pada tanggal 22 oktober 2014

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/jumlah-penduduk-kota-makassar-mencapai-17-penduduk-sulawesi-selatan> diakses pada tanggal 23 agustus 2019

<https://makassar.sindonews.com/read/30242/2/gawat-254-lahan-pemkot-makassar-belum-bersertifikat-1566346118> diakses pada tanggal 21 agustus 2019

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail.hukum@unhas.ac.id

Nomor : 3325/UN4.5.3/PT.00/2020
Lampiran : -
Hal : PRA PENELITIAN
Kepada :
Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
di,-
Tempat

Makassar, 08 Juni 2020

Dengan hormat,
Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : HAERUNI HANDAYANI
No. Pokok : B12116017
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Makassar, Baji Minasa 2 rw.03, Tamarunang, Kec. Mariso

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan rencana penyusunan Skripsi dengan topik :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,

Dr. Muh. Hasrul, SH, MH
NIP. 19610418 200212 1 004

- Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2020-06-08 07:12:21



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 10 Juni 2020

K e p a d a

Nomor : 070 / 78 – II/BKBP/VI/2020
Sifat :
Perihal : Izin Pengambilan Data

Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor :
3325/UN4.5.3/PT.00/2020 Tanggal 08 Juni 2020, Perihal tersebut di atas, maka
bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : HAERUNI HANDAYANI
NIM / Jurusan : B12116017 / Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK
MILIK"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam
rangka *Penyusunan Proposal* sesuai dengan judul di atas, yang akan
dilaksanakan mulai tanggal **10 Juni s/d 10 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui**
dengan memberikan surat rekomendasi izin pengambilan data ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN

Ir. H. JAMAING, M.Sc
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19601231 198003 1 064

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX : (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 5350/UN4.5.3/PT.00/2020
Lampiran : -
Hal : PENELITIAN

Makassar, 27 Agustus 2020

Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul Sel
di-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : HAERUNI HANDAYANI
No. Pokok : B12116017
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Makassar, Baji Minasa 2 rw.03, Tamarunang, Kec. Mariso
Pembimbing : 1. Dr. Muh. Hasrul SH.,MH
2. Ariani Arifin SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kerjasama,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH
16610418.200212.1.004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2020-08-27 12:22:02



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5466/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 5350/UN4.5.3/PT.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HAERUNI HANDAYANI
Nomor Pokok : B12116017
Program Studi : Hukum Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK "

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 07 September s/d 07 Oktober 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*. Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar,
2. Peringkat

SIMAP PTSP 03-09-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 04 September 2020

Kepada

Nomor : 070 / 1465 -II/BKBP/IX/2020
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5466/S.01/PTSP/2020 Tanggal 03 September 2020, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

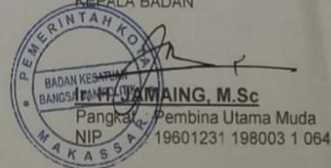
Nama : HAERUNI HANDAYANI
NIM / Jurusan : B12116017/ Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10,, Makassar
Judul : "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK
MILIK"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **07 September s/d 07 Oktober 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700
MAKASSAR 90111

Makassar, 30 November 2020

K e p a d a

Nomor : 900/1870/BPKAD/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian.

Yth. **Bapak / Ibu Dekan Fakultas Hukum**
Universitas Hasanuddin
di-
Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Nomor 070/1465-II/BPKP/IX/2020, perihal Permohonan izin penelitian atas nama **HAERUNI HANDAYANI** dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK"** di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, yang akan berlangsung mulai tanggal 07 September 2020 s/d 07 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada saudara bahwa pada prinsipnya kami menerima untuk melaksanakan Pengambilan Data terkait izin penelitian, sesuai jadwal yang ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n PIt. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN**
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
MAKASSAR
Kepala Bidang Aset



Drs. MUHAMMAD RACHMAT AZIS, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19791022 199101 1 003



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTANAHAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 316006
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800.2/481 /DISTAN/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. SITI SUMAENA, MM**
NIP : 19660212 199803 2 002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **HAERUNI HANDAYANI**
NIM / Jurusan : B12116017 / Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswi (S1) / UNHAS Makassar
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi mulai tanggal 07 September s/d 07 Oktober 2020 dengan Judul: **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGAWASAN ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 September 2020

A.n **KEPALA DINAS PERTANAHAN**
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Dra. Hj. SITI SUMAENA, M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19660212 199803 2 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar di Makassar.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Makassar di Makassar.
3. Pertinggal.